



### INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DI JAWA TENGAH 2015

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH 2015 SEBESAR 69,75 DALAM SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI TURUN 7,69 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI JAWA TENGAH 2014 SEBESAR 77,44.

- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah 2015 sebesar 69,75 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini turun 7,69 poin dibandingkan dengan IDI 2014 sebesar 77,44. Kinerja demokrasi Jawa Tengah masih berada pada kategori “sedang”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
- Penurunan IDI dari 2014-2015 dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yakni Kebebasan Sipil turun 8,43 poin (dari 87,87 menjadi 79,44), Hak-Hak Politik yang naik 0,20 poin (dari 67,08 menjadi 67,28), dan Lembaga-lembaga Demokrasi yang turun 19,29 poin (dari 80,77 menjadi 61,48).
- Metodologi pengumpulan data IDI terdiri dari 4 sumber data yaitu : (1) *review* surat kabar lokal, (2) *review* dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

#### 1. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah 2015

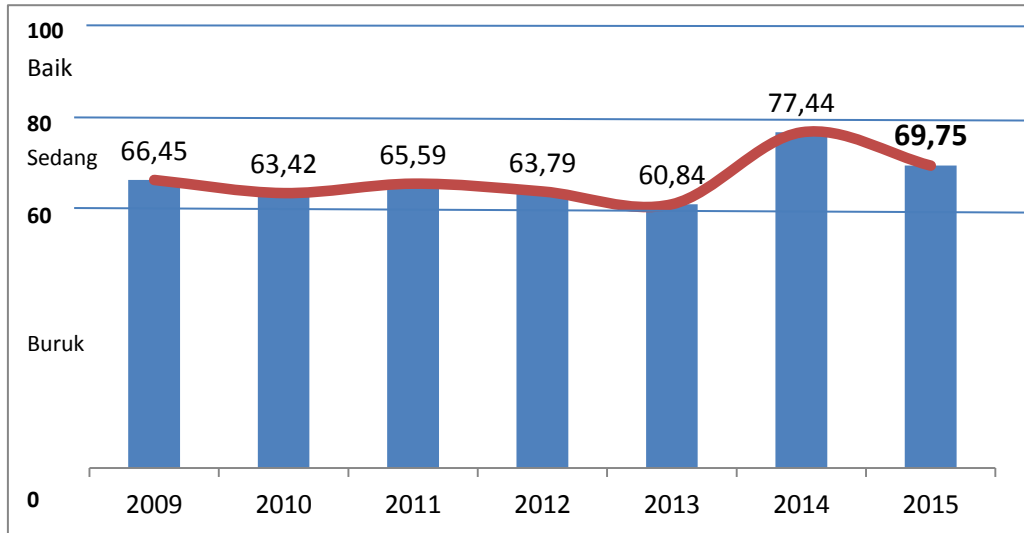
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah 2015 sebesar **69,75** dari skala 0 sampai 100, angka ini turun **7,69** poin dibandingkan dengan IDI Jawa Tengah 2014 sebesar 77,44. Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi di Jawa Tengah secara umum masih dalam kategori “sedang”.

Capaian IDI dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi. Pada awal mula IDI dihitung tahun 2009 IDI sebesar 66,45. Kemudian turun pada tahun 2010 sebesar 63,42, lalu naik pada tahun 2011 menjadi 65,59; kemudian turun pada tahun 2012 menjadi 63,79; 2013 sebesar 60,84; 2014 naik sebesar 77,44, dan 2015 turun menjadi 69,75. Nilai IDI 2014 merupakan capaian tertinggi selama 7 tahun penghitungan IDI (2009-2015).

Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan 2 (dua) indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini.

Fluktuasi angka IDI adalah cermin dinamika situasi demokrasi di Jawa Tengah. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

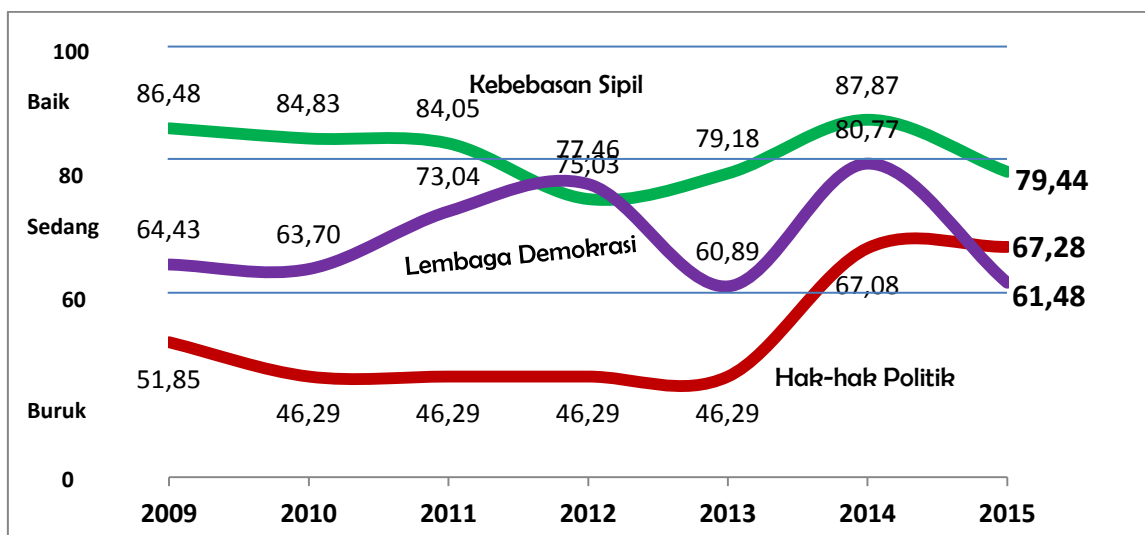
**Grafik 1. Perkembangan IDI di Jawa Tengah, 2009-2015**



## 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI di Jawa Tengah

Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik, dan aspek Lembaga Demokrasi. Untuk capaian demokrasi 2015 nilai indeks aspek Kebebasan Sipil sebesar 79,44; aspek Hak-hak Politik sebesar 67,28; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 61,48.

**Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI di Jawa Tengah, 2009-2015**



Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, sejak 2014 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil pada awal pengukuran 2009 sudah mencapai kategori “baik”. Namun, pada 2012, 2013, dan 2015 aspek ini menjadi kategori “sedang”.

Sementara pada aspek Hak-hak Politik sejak 2009 hingga 2013 stabil pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada 2014, aspek ini menembus kategori “sedang”. Pada IDI 2015 aspek Hak-hak Politik tetap pada kategori “sedang”.

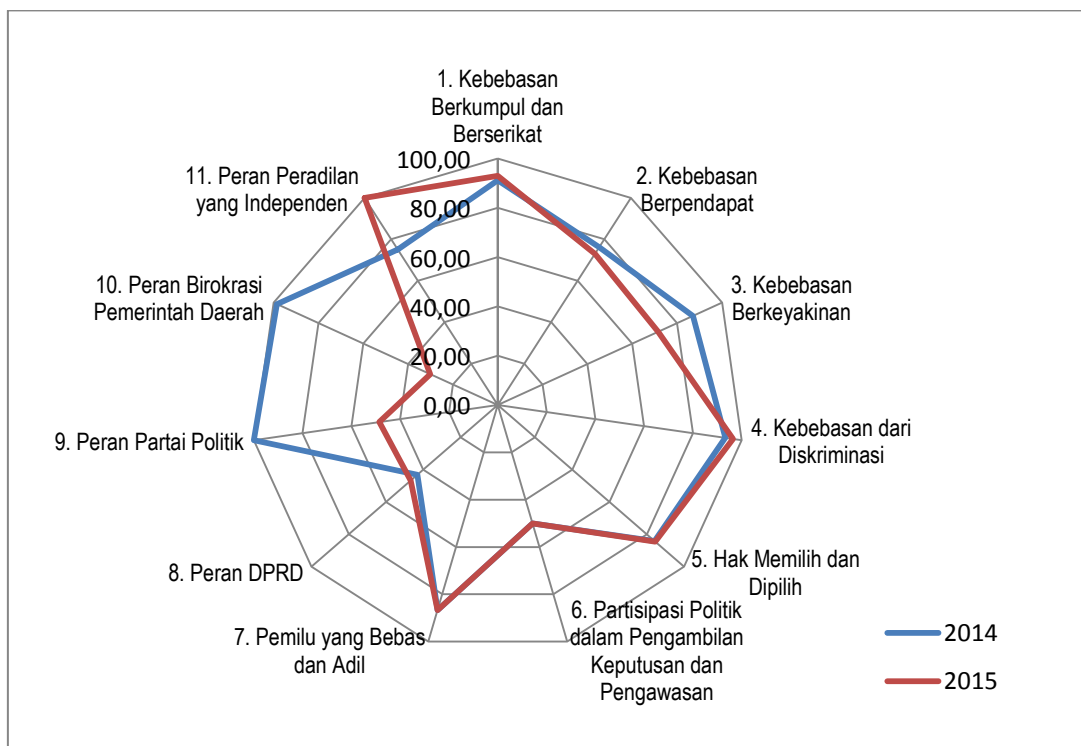
Aspek Lembaga Demokrasi merupakan aspek yang secara kategori stabil. Sejak pengukuran pada 2009 hingga 2015 aspek Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”.

Selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun IDI dihitung, baru pertama kali ini indeks aspek Hak-hak Politik lebih tinggi dibandingkan aspek Lembaga Demokrasi. Sementara nilai aspek Kebebasan Sipil selalu berada pada posisi di atas aspek lainnya. Pada tahun 2015 merupakan waktu di mana rentang nilai ketiga aspek paling rapat, yakni antara 61,48 – 79,44. Pada tahun-tahun sebelumnya rentang nilainya lebih lebar. Ini terjadi karena terjadinya peningkatan aspek Hak-hak Politik yang cukup bermakna. Indeks aspek Hak-hak Politik mengalami peningkatan 0,20 poin. Sementara nilai aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi mengalami penurunan masing-masing sebesar 8,43 dan 19,29 poin.

### 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI di Jawa Tengah

Menurut nilai indeks variabel IDI 2014 terdapat lima variabel yang mengalami peningkatan indeks, empat variabel mengalami penurunan dan dua variabel yang tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2014. Dari lima variabel yang mengalami kenaikan, satu diantaranya meningkat cukup berarti yaitu pada kenaikan indeks variabel Peran Peradilan yang Independen. Grafik 3 memperlihatkan variabel Peran Peradilan yang Independen meningkat dari kategori sedang menjadi baik, dari 75,00 pada 2014 menjadi 100,00 pada 2015. Selebihnya meningkat tidak cukup bermakna, nilai indeks masih pada kategori yang sama.

**Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI di Jawa Tengah, 2014 - 2015**



Dari empat variabel yang mengalami penurunan, tiga diantaranya menurun cukup bermakna. Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah menurun sangat tajam sebesar 68,35 poin dari 98,48 pada 2014 menjadi 30,13 pada 2015. Akibat penurunan tersebut kategori indeks variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah merosot dari kategori “baik” menjadi “buruk”. Penurunan ini sejatinya imbas dari perubahan indikator penyusunnya. Pada tahun 2005 dilakukan evaluasi IDI yang salah satunya mengevaluasi komponen IDI. Hasilnya merekomendasi mulai IDI 2015 perlu dilakukan penggantian pada indikator 25 dan 26. Dengan demikian komponen variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah berubah. Selain variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, variabel Peran Partai Politik dan Kebebasan Berkeyakinan juga mengalami penurunan yang berarti. Capaian indeks variabel Peran Partai Politik dari kategori “baik” pada 2014 (99,96) menjadi kategori “buruk” pada 2015 (48,49). Sedangkan variabel Kebebasan Berkeyakinan dari kategori “baik” pada 2014 (87,06) menjadi kategori “sedang” pada 2015 (71,58). Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

#### **4. Perkembangan Skor Indikator IDI di Jawa Tengah**

Indikator pada IDI 2015 terdapat 14 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 24, 27, dan 28 (lihat Tabel 2 angka yang bercetak tebal). Namun, pada tahun 2015 masih terdapat masalah kronis yakni kinerja demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah indikator (2) Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, (4) Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat, (7) Ancaman/Penggunaan Kekerasan dari Satu Kelompok Terkait Ajaran Agama, (16) Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan, (21) Perda yang Berasal dari Hal Inisiatif DPRD, (22) Rekomendasi DPRD kepada eksekutif, (23) Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Parpol Peserta Pemilu, (25) Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Keputusan PTUN, dan (26) Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. Indikator tersebut nampaknya memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik.

Menarik perhatian mengapa aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan yang cukup bermakna dari 80,77 pada tahun 2014 menjadi 61,48 pada tahun 2015 atau menurun 19,29 poin. Dari perubahan indikatornya dapat diketahui penurunan utamanya dipicu oleh indikator 25 dan indikator 26 yang masing-masing menurun menjadi 26,32 dan 33,33. Indikator 25 dan 26 sesungguhnya merupakan indikator baru yang menggantikan indikator sebelumnya. Indikator 25 adalah Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh PTUN dan indikator 26 adalah Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah.

#### **5. Penjelasan Teknis**

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian

Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholder*, tidak hanya pemerintah saja.

**Tabel 1. Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2014**

Aspek	Variabel	Indikator *)
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dlm Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
3. Institusi Demokratis	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Catatan: \*) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 2

Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *focus group discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya

Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI

Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

**Tabel 2. Perkembangan Indeks Aspek, Variabel, dan Skor Indikator IDI 2014-2015**

ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR		2014	2015
	<b>INDEKS DEMOKRASI INDONESIA</b>	77,44	69,75
<b>A.</b>	<b>KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)</b>	87,87	79,44
<b>I.</b>	<b>Kebebasan berkumpul dan berserikat</b>	91,25	92,97
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	90,00	<b>100,00</b>
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	43,75
<b>II.</b>	<b>Kebebasan berpendapat</b>	76,12	72,89
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	73,33	<b>87,50</b>
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	90,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Kebebasan berkeyakinan</b>	87,06	71,58
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	91,30	<b>83,70</b>
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	87,50	68,75
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	70,00	25,00
<b>IV.</b>	<b>Kebebasan dari diskriminasi</b>	93,23	96,43
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	<b>100,00</b>
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	87,50	<b>87,50</b>
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	90,00	<b>100,00</b>
<b>B.</b>	<b>HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)</b>	67,08	67,28
<b>V.</b>	<b>Hak memilih dan dipilih</b>	84,16	84,57
11	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	92,95	<b>92,95</b>
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih	60,00	60,00
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	89,65	<b>89,65</b>
14	Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu ( <i>voters turnout</i> )	73,24	73,24
15	Perempuan terpilih di DPRD provinsi	76,67	<b>80,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan</b>	50,00	50,00
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0,00	0,00
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	<b>100,00</b>
<b>C.</b>	<b>LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)</b>	80,77	61,48
<b>VII.</b>	<b>Pemilu yang bebas dan adil</b>	86,71	86,71
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu	100,00	<b>100,00</b>
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	73,42	73,42
<b>VIII.</b>	<b>Peran DPRD</b>	43,22	46,75
20	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	54,81	63,17
21	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD	41,18	28,57
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	3,57	3,57
<b>IX.</b>	<b>Peran Partai politik</b>	99,96	48,49
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	100,00	42,86
24	Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	99,64	<b>99,19</b>

ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR		2014	2015
<b>X.</b>	<b>Peran Birokrasi Pemerintah Daerah</b>	98,48	30,13
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	-	26,32
	Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif	100,00	-
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah/	-	33,33
	Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif	96,97	-
<b>XI.</b>	<b>Peran Peradilan yang independen</b>	75,00	100,00
27	Keputusan hakim yang kontroversial	50,00	<b>100,00</b>
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	<b>100,00</b>